



SURAT KETERANGAN PENELITIAN / REKOMENDASI
 NOMOR : 070/0290/IP/DPM PTSP/2025

- I. Dasar
 - 1. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 608/E-13/HK/2020 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
 - 2. Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor : 1459/UN48.13.1/DL/2025, Tanggal 11 Juli 2025, Perihal Permohonan Data dan Penelitian,
 - 3. Surat permohonan yang bersangkutan nomor : 0345/DPMPPTSP/IP/2025 tanggal 14 Juli 2025.
- II. Setelah Mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama	: Pande Komang Ayu Sinta Lestari
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Link. Sema, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
Judul Penelitian	: Analisis Kompetensi SDM Akuntansi Dan Pengendalian Internal Dalam Penyusunan LKPD (Studi Kualitatif Di BPKAD Kabupaten Gianyar)
Lokasi Penelitian	: BPKAD Kabupaten Gianyar
Jumlah Peserta	: 1 Orang
- III. Lama Penelitian : 11 Juli 2025 s/d 28 Februari 2026
 - 1. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang
 - 2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan. Apabila melanggar ketentuan, maka Surat Keterangan/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
 - 3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
 - 4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
 - 5. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
 - 6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di Gianyar
 Pada Tanggal 14 Juli 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Gianyar



I WAYAN ARTHAWAN, S.STP
 Pembina Tingkat I IV/b
 Nip. 19861218 200602 1 001

- Tembusan kepada Yth. :
- 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar
 - 2. Kepala DPM-PTSP Prov. Bali
 - 3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali
 - 4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Gianyar
 - 5. Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai keperluan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar Lampiran 2 surat izin penelitian BPKAD



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/REKOMENDASI
 NOMOR : 070/0523/IP/DPM PTSP/2026

- I. Dasar
 - 1. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 608/E-13/HK/2020 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
 - 2. Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor : 224/UN48.13.1/PT.01.04/2026, Tanggal 5 Februari 2026, Perihal Permohonan Data Penelitian,
 - 3. Surat permohonan yang bersangkutan nomor : 0616/DPMPPTSP/IP/2026 tanggal 9 Februari 2026.
- II. Setelah Mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Kepada :
 - Nama : Pande Komang Ayu Sinta Lestari
 - Pekerjaan : Mahasiswa
 - Alamat : Lingk. Sema, Desa Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar
 - Judul Penelitian : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Lokasi Penelitian : Inspektorat Kabupaten Gianyar
 - Jumlah Peserta : 1 Orang
 - Lama Penelitian : 19 Februari 2026 s/d 30 Agustus 2026
- III. Dalam melakukan kegiatan agar bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang
 - 2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan. Apabila melanggar ketentuan, maka Surat Keterangan/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
 - 3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
 - 4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
 - 5. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
 - 6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di Gianyar
 Pada Tanggal 10 Februari 2026
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Gianyar



NI LUH GEDE EKA SUARY, SE, M.SI.
 Pembina Utama Muda IV/c
 Nip. 197004101989032005

- Tembusan kepada Yth. :
- 1. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
 - 2. Kepala DPM-PTSP Prov. Bali
 - 3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali
 - 4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Gianyar
 - 5. Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai keperluan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar Lampiran 3 surat izin penelitian inspektorat



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/REKOMENDASI
 NOMOR : 070/0524/IP/DPM PTSP/2026

- I. Dasar
 - 1. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 608/E-13/HK/2020 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
 - 2. Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor : 224/UN48.13.1/PT.01.04/2026, Tanggal 5 Februari 2026, Perihal Permohonan Data Penelitian,
 - 3. Surat permohonan yang bersangkutan nomor : 0617/DPMPPTSP/IP/2026 tanggal 9 Februari 2026.
- II. Setelah Mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Kepada :
 - Nama : Pande Komang Ayu Sinta Lestari
 - Pekerjaan : Mahasiswa
 - Alamat : Lingk. Sema, Desa Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar
 - Judul Penelitian : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Lokasi Penelitian : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gianyar
 - Jumlah Peserta : 1 Orang
 - Lama Penelitian : 9 Februari 2026 s/d 30 Agustus 2026
- III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang
 - 2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan. Apabila melanggar ketentuan, maka Surat Keterangan/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
 - 3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
 - 4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
 - 5. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
 - 6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di Gianyar
 Pada Tanggal 10 Februari 2026
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Gianyar



NI LUH GEDE EKA SUARY, SE, M.SI.
 Pembina Utama Muda IV/c
 Nip. 197004101989032005

- Tembusan kepada Yth. :
- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gianyar
 - 2. Kepala DPM-PTSP Prov. Bali
 - 3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali
 - 4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Gianyar
 - 5. Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai keperluan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar Lampiran 4 surat izin penelitian Bappeda

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

- Judul penelitian : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Gianyar)
- Metode Pengumpulan Data : Wawancara Mendalam (*In Depth Review*)
- Tujuan Wawancara : Untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, pengendalian internal, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

A. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN BPKAD BAGIAN KEUANGAN

Tabel Lampiran 1
Pedoman Wawancara Informan BPKAD

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Profil informan	Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan jabatan serta tugas Bapak/Ibu dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah?
2	Peran BPKAD dalam penyusunan LKPD	Bagaimana peran BPKAD khususnya Subbidang Akuntansi dalam proses penyusunan LKPD Kabupaten Gianyar?
3	Pihak yang terlibat	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah?
4	Koordinasi antar OPD	Bagaimana mekanisme koordinasi antara BPKAD dengan OPD dalam penyusunan laporan keuangan?
5	Alur penyusunan LKPD	Bagaimana tahapan atau alur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan?

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
6	Sistem informasi keuangan	Apakah penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan sistem informasi keuangan daerah? Bagaimana peran sistem tersebut?
7	Proses konsolidasi laporan	Bagaimana proses konsolidasi laporan keuangan dari seluruh OPD menjadi LKPD?
8	Mekanisme verifikasi data	Bagaimana proses verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan yang dilakukan oleh BPKAD?
9	Tahapan paling krusial	Menurut Bapak/Ibu, tahapan mana yang paling krusial dalam proses penyusunan LKPD?
10	Kendala dalam penyusunan LKPD	Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah?
11	Peran SDM	Bagaimana peran sumber daya manusia dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah?
12	Upaya peningkatan kualitas LKPD	Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah?

B. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN INSPEKTORAT

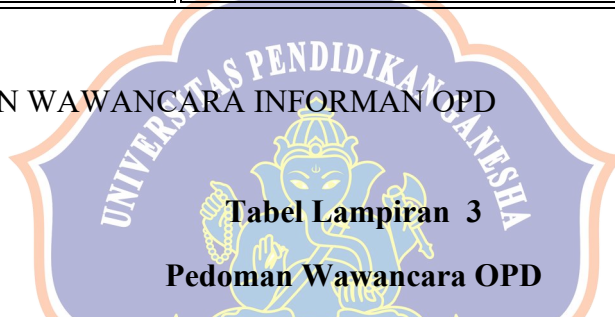
Tabel Lampiran 2

Pedoman Wawancara Inspektorat

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Peran Inspektorat	Apa peran Inspektorat dalam proses pengawasan dan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?
2	Pelaksanaan review LKPD	Bagaimana proses pelaksanaan review LKPD sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK?
3	Landasan operasional review	Apa saja pedoman atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan review laporan keuangan oleh Inspektorat?
4	Tahapan review	Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses review laporan keuangan pemerintah daerah?

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
5	Metode analisis	Metode atau teknik apa yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan daerah?
6	Jenis temuan yang sering muncul	Apa saja jenis temuan yang paling sering ditemukan dalam laporan keuangan daerah?
7	Penyebab temuan	Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya temuan dalam laporan keuangan daerah?
8	Efektivitas pengendalian internal	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah?
9	Koordinasi dengan OPD dan BPKAD	Bagaimana koordinasi yang dilakukan Inspektorat dengan OPD dan BPKAD dalam proses review?
10	Tindak lanjut temuan	Bagaimana mekanisme tindak lanjut terhadap temuan hasil review maupun hasil pemeriksaan BPK?

C. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN OPD



Tabel Lampiran 3

Pedoman Wawancara OPD

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Peran bendahara OPD	Apa tugas dan tanggung jawab bendahara dalam pengelolaan keuangan di OPD?
2	Proses pencatatan transaksi	Bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan di tingkat OPD?
3	Dokumen pendukung	Dokumen apa saja yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan?
4	Penggunaan sistem keuangan daerah	Bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan daerah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi?
5	Pelaporan keuangan OPD	Bagaimana proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dari OPD kepada BPKAD?
6	Rekonsiliasi dengan BPKAD	Bagaimana mekanisme rekonsiliasi data keuangan antara OPD dan BPKAD?
7	Kendala dalam pengelolaan keuangan	Apa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di OPD?
8	Kapasitas sumber daya manusia	Bagaimana kondisi sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan di OPD?

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara
9	Pengendalian internal	Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di OPD?
10	Upaya perbaikan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Informan 1

Transkrip Wawancara Bersama Kepala SubBidang Akuntansi Dan Keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar

Lokasi : BPKAD Kabupaten Gianyar Bagian Keuangan
 Informan / Jabatan : Gede Maheka Yuda / Kepala SubBidang Akuntansi Dan Keuangan
 Peneliti : Pande Komang Ayu Sinta Lestari



Tabel Lampiran 4
Transkrip Wawancara Informan BPKAD

Peneliti / Informan	Jawaban
Peneliti	: Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Pande Komang Ayu Sinta Lestari, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini.
Informan	: Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Peneliti	: Sebelum masuk ke pembahasan penelitian, boleh saya tahu terlebih dahulu jabatan Bapak dan peran Bapak dalam proses pengelolaan keuangan daerah di BPKAD?
Informan	: Saya disini sebagai Kepala SubBidang Akuntansi Dan Keuangan yang menangani pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta koordinasi dengan OPD
Peneliti	: Berarti Bapak cukup terlibat langsung dalam proses penyusunan LKPD ya?
Informan	: Iya, karena pada akhirnya seluruh laporan dari OPD akan dihimpun di BPKAD sebelum menjadi LKPD.

Peneliti / Informan	Jawaban
Peneliti	: Baik Pak, untuk memberikan gambaran awal dalam penelitian saya, saya ingin bertanya secara umum dulu. Bagaimana sebenarnya alur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar mulai dari tahap awal sampai akhirnya diperiksa oleh BPK?
Informan	: Proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari perencanaan dan penganggaran di masing-masing OPD, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penatausahaan. Setelah itu, laporan dari OPD dihimpun oleh BPKAD untuk dilakukan verifikasi dan konsolidasi sebelum masuk tahap review Inspektorat dan disampaikan ke BPK
Peneliti	: Berarti proses penyusunan laporan keuangan daerah sebenarnya tidak sebatas dilakukan di akhir tahun ya Pak?
Informan	: Betul. Laporan keuangan itu sebenarnya sudah mulai terbentuk sejak tahap perencanaan anggaran
Peneliti	: Kalau kita mulai dari tahap paling awal dulu Pak, sesuai dengan yang bapak katakan tadi yaitu tahap perencanaan dan penganggaran. Bisa Bapak jelaskan bagaimana proses perencanaan tersebut berlangsung?
Informan	: Tahap perencanaan biasanya dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahap ini perangkat daerah menyusun arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta kerangka ekonomi daerah yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran
Peneliti	: Apakah pada tahap RKPD sudah ada rincian anggaran untuk setiap kegiatan?
Informan	: Belum terlalu rinci. RKPD lebih kepada kerangka program dan prioritas pembangunan daerah.
Peneliti	: Setelah RKPD selesai disusun, bagaimana tahapan berikutnya?
Informan	: Tahap berikutnya adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Peneliti	: Apa peran BPKAD dalam tahap ini?
Informan	: BPKAD melakukan analisis kemampuan keuangan daerah serta membantu penyusunan kebijakan anggaran agar sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
Peneliti	: Setelah plafon anggaran ditetapkan, apa yang dilakukan oleh OPD?

Peneliti / Informan	Jawaban
Informan	: Ya, sejak tahap RKA sudah menggunakan kode rekening yang sesuai dengan struktur akun dalam sistem keuangan daerah.
Peneliti	: Apakah BPKAD juga melakukan verifikasi terhadap dokumen RKA tersebut?
Informan	: Iya, kami melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara program, kegiatan, serta klasifikasi akun. RKA yang telah diverifikasi kemudian dikonsolidasikan menjadi Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, semua sudah terkunci di sistem. Jadi setiap transaksi harus sesuai kode rekening yang ada. Itu yang membuat laporan di akhir tahun sudah mengikuti struktur dari awal
Peneliti	: Berarti sistem informasi keuangan daerah juga berfungsi sebagai alat pengendalian ya Pak?
Informan	: Iya, karena setiap transaksi harus mengikuti struktur anggaran yang sudah ditetapkan.
Peneliti	: Setelah APBD ditetapkan, kita masuk ke tahap pelaksanaan anggaran sesuai dengan informasi yang bapak sampaikan sebelumnya . Bagaimana proses ini berlangsung di pemerintah daerah?
Informan	: Pada tahap ini seluruh OPD mulai melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.
Peneliti	: Apakah setiap transaksi yang terjadi langsung dicatat dalam sistem keuangan daerah?
Informan	: Ya. Semua transaksi dicatat berdasarkan dokumen sumber yang sah.
Peneliti	: Berarti data transaksi yang terjadi selama pelaksanaan anggaran ini nantinya akan dijadikan acuan saat menyusun laporan keuangan?
Informan	: Betul sekali.
Peneliti	: Dalam tahap ini, bagaimana peran BPKAD?
Informan	: BPKAD berperan dalam pengelolaan kas daerah, pengendalian sistem keuangan, serta verifikasi transaksi sebelum pembayaran dilakukan.

Peneliti / Informan	Jawaban
Peneliti	: Setelah seluruh transaksi selama tahun anggaran tercatat, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah?
Informan	: Semua laporan dari OPD akan dikirimkan ke BPKAD. Semua laporan dari OPD akhirnya masuk ke kami. Kami yang bertanggung jawab menyajikan LKPD secara keseluruhan sebelum disampaikan ke tahap berikutnya
Peneliti	: Apa yang pertama kali dilakukan oleh BPKAD ketika laporan tersebut masuk?
Informan	: Kami melakukan pengecekan dan rekonsiliasi data. Setelah laporan dari OPD masuk, kami lakukan pengecekan kembali dan rekonsiliasi dengan data yang ada di sistem sebelum dikonsolidasikan menjadi LKPD
Peneliti	: Apa saja yang biasanya dicek pada tahap awal tersebut?
Informan	: Kami mengecek kelengkapan laporan serta kesesuaian klasifikasi akun, Kalau ada laporan OPD yang belum lengkap atau ada kesalahan klasifikasi akun, kami kembalikan untuk diperbaiki sebelum masuk tahap rekonsiliasi
Peneliti	: Setelah seluruh laporan dinyatakan lengkap, bagaimana proses rekonsiliasi dilakukan?
Informan	: Rekonsiliasi dilakukan secara internal di BPKAD. Sebelum dikonsolidasikan, data dari bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan aset harus sinkron dulu. Kalau ada selisih, diselesaikan di internal BPKAD. Setelah data sinkron, ada proses penyesuaian jurnal akrual seperti beban yang masih harus dibayar atau penyusutan aset kami lakukan sebelum laporan dikunci, supaya angka yang disajikan sesuai standar akuntansi
Peneliti	: Setelah laporan disusun oleh BPKAD, apakah langsung diserahkan ke BPK?
Informan	: Tidak langsung. sebelum ke bpk kami punya sisitem pengendalian internal sendiri yakni inspektorat, inspektorat akan me;laksanakan pemeriksaan terlebih dahulu atas LKpd yang kami susun baru kemudian diserahkan ke BPK Sebelum diserahkan ke Inspektorat, kami pastikan semua sudah final. Jadi BPKAD menjadi tahap terakhir sebelum masuk review, jika ada temuan atau catatan dari inspektorat atas LKPD tersebut maka kami akan langsung melakukan penyesuaian, kalau ada usulan perbaikan dari inspektorat, kami koordinasikan dengan OPD dan lakukan penyesuaian jurnal sebelum laporan benar benar final, setelah itu kalau dari inspektorat sudah oke baru diserahkan ke BPK , saat pemeriksaan BPK pun kami di BPKAD tetap menyediakan

Peneliti / Informan	Jawaban
	dokumen pendukung dan memberikan klarifikasi atas kesesuaian akun yang diminta
Peneliti	: Baik bapak, kalau kendala dalam praktik penyusunan LKPD apakah terdapat kendala yang muncul dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah ?
Informan	: Secara regulasi dan sistem sebenarnya sudah lengkap, tetapi dalam praktiknya tetap ada kendala, terutama menjelang tutup tahun anggaran
Peneliti	: Bisa dijelaskan kendala seperti apa yang paling sering terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut?
Informan	: Kendala yang paling sering dihadapi dalam penyusunan LKPD berkaitan dengan gangguan teknis pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Mengingat seluruh proses penyusunan laporan keuangan sangat bergantung pada sistem, gangguan teknis dapat menghambat kelancaran proses pencatatan, pengolahan, dan konsolidasi data keuangan.
Peneliti	: Selain kendala teknis pada sistem, apakah ada kendala lain yang sering ditemui dalam proses penyusunan laporan keuangan?
Informan	: Selain kendala sistem, kendala lain yang dihadapi adalah kesalahan klasifikasi dan pembebanan belanja oleh OPD. Kesalahan tersebut umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur (SDM yang terlibat) terhadap klasifikasi akun belanja yang sesuai. Kondisi ini menuntut peran aktif Subbidang Akuntansi dalam melakukan rekonsiliasi, validasi, dan koreksi data.
Peneliti	: Jika terjadi kesalahan klasifikasi akun seperti itu, apa yang biasanya dilakukan oleh BPKAD?
Informan	: Kalau ada kesalahan klasifikasi atau pencatatan, laporan tersebut kami kembalikan ke OPD untuk diperbaiki sebelum masuk ke tahap rekonsiliasi
Peneliti	: Apakah keterlambatan dari OPD juga mempengaruhi proses penyusunan LKPD di tingkat pemerintah daerah?
Informan	: Iya, karena terkadang rekonsiliasi internal di OPD belum selesai sehingga laporan yang masuk ke BPKAD menjadi terlambat
Peneliti	: Berarti proses rekonsiliasi pada tingkat OPD juga sangat menentukan kelancaran penyusunan LKPD ya Pak?
Informan	: Betul. Kalau rekonsiliasi internal OPD terlambat, maka proses konsolidasi di BPKAD juga ikut tertunda. Akhir tahun itu memang paling berat, karena semua pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Kalau laporan dari OPD terlambat atau proses konsolidasi di BPKAD memerlukan

Peneliti / Informan	Jawaban
	waktu lebih lama, otomatis waktu yang tersedia untuk review Inspektorat juga menjadi lebih sempit
Peneliti	: Namun meskipun terdapat berbagai kendala tersebut, apakah proses penyusunan laporan keuangan tetap dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan?
Informan	: Iya, prosesnya tetap harus diselesaikan sesuai tahapan yang ada. Biasanya kami melakukan koordinasi dengan OPD agar perbaikan data bisa segera dilakukan sehingga laporan dapat segera direkonsiliasi dan dikonsolidasikan.
Peneliti	: Berarti koordinasi dengan OPD menjadi bagian penting dalam mengatasi keterlambatan tersebut ya Pak?
Informan	: Iya, karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi dari seluruh OPD. Jadi kalau ada keterlambatan atau kesalahan, kami harus segera berkoordinasi agar perbaikan bisa dilakukan sebelum laporan masuk ke tahap berikutnya
Peneliti	: Dari beberapa kendala yang Bapak sampaikan tadi, baik terkait keterbatasan SDM, kesalahan klasifikasi akun, maupun kendala teknis pada sistem informasi keuangan daerah, tentu hal tersebut memerlukan upaya perbaikan agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Langkah apa saja yang biasanya dilakukan oleh BPKAD untuk mengatasi kendala tersebut?
Informan	: Kendala memang ada setiap tahun, tapi kami terus berupaya memperbaiki melalui pembinaan dan evaluasi. Biasanya kami melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD, terutama bagi pegawai yang menangani pengelolaan keuangan. tapi perlu ditingkatkan lagi terutama menjelang akhir tahun. Karena pada periode tersebut biasanya terjadi peningkatan aktivitas pencatatan dan penyusunan laporan, sehingga potensi kesalahan juga lebih besar.
Peneliti	: Selain pembinaan kepada OPD, apakah ada langkah lain yang dilakukan oleh BPKAD untuk meminimalkan kesalahan pencatatan?
Informan	: Iya, kami juga melakukan evaluasi terhadap kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan sebenarnya bisa dicegah sejak tahap awal pencatatan.
Peneliti	: Berarti BPKAD juga melakukan evaluasi terhadap proses pencatatan keuangan di OPD?
Informan	: Betul. Dari evaluasi tersebut biasanya kami mengetahui jenis kesalahan yang paling sering muncul, misalnya kesalahan klasifikasi akun atau pencatatan pajak. hasil evaluasi tersebut

Peneliti / Informan	Jawaban
	biasanya kami gunakan sebagai bahan pembinaan kepada OPD agar kesalahan yang sama tidak terulang pada periode berikutnya.
Peneliti	: Terkait dengan kendala teknis pada sistem yang Bapak sampaikan sebelumnya, seperti akses sistem yang melambat ketika semua OPD menggunakan sistem secara bersamaan, apakah ada upaya tertentu untuk mengantisipasi hal tersebut?
Informan	: Lonjakan akses memang menjadi tantangan teknis yang perlu diantisipasi Biasanya kami melakukan koordinasi dengan OPD agar proses input data tidak dilakukan secara bersamaan, serta memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem sudah melalui pengecekan terlebih dahulu
Peneliti	: Berarti koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan laporan keuangan?
Informan	: Iya, koordinasi sangat penting karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi dari seluruh OPD.
Peneliti	: Dengan adanya berbagai upaya tersebut, apakah Bapak melihat adanya perbaikan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah dari tahun ke tahun?
Informan	: Secara umum memang ada perbaikan, walaupun tantangan tetap ada, terutama pada periode akhir tahun anggaran. Akhir tahun itu paling krusial karena semua pekerjaan menumpuk
Peneliti	: Baik Pak, berarti dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, BPKAD tetap melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pembinaan, evaluasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih baik.
Informan	: Iya, memang seperti itu prosesnya
Peneliti	: Pak, setelah Bapak menjelaskan seluruh proses tadi mulai dari perencanaan sampai pemeriksaan BPK, prosesnya terlihat sangat panjang dan kompleks. Bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa proses penyusunan LKPD di Kabupaten Gianyar berjalan sedetail itu?
Informan	: Karena seluruh proses tersebut memang diatur dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta dijalankan oleh seluruh OPD dan dikoordinasikan oleh BPKAD. Selain

Peneliti / Informan	Jawaban
	itu, setiap tahapan juga diawasi melalui mekanisme rekonsiliasi, review oleh Inspektorat, serta pemeriksaan oleh BPK.
Peneliti	: Baik terimakasih bapak atas waktu dan penjelasan yang sangat detail sekali terkait dengan penyusunan laporan keuangannya, mungkin kedepannya saya akan lebih sering berkoordinasi dengan bapak terkait dengan penyusunan LKPD ini supaya informasi yang saya sajikan lebih akurat lagi
Informan	: Baik dik, dengan senang hati, kalau misalnya mau melakukan penyusunan disini juga bisa nnti saya bantu sambil jalan
Peneliti	: Baik bapak terimakasih banyak
Informan	: Sama sama dik, semoga cepat lulus dan sukses ya

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Informan 2

Transkrip Wawancara Bersama OPD (BAPPEDA & LITBAG) Kabupaten Gianyar

Lokasi	: BAPPEDA & LITBAG Kabupaten Gianyar
Informan/ jabatan	: A.A. Diah Arie Kencanawathy, Amd (Bendahara OPD)
Peneliti	: Pande Komang Ayu Sinta Lestari

Tabel Lampiran 5

Transkrip Wawancara Informan Bappeda (OPD)

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Peneliti	: Selamat pagi Bu, terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Pande Komang Ayu Sinta Lestari, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar, khususnya terkait bagaimana proses pencatatan, penatausahaan, serta penyusunan laporan keuangan pada tingkat perangkat daerah sebelum laporan tersebut dikonsolidasikan oleh BPKAD.

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Peneliti	Sebelum masuk ke pertanyaan penelitian, saya ingin memastikan terlebih dahulu, saat ini Ibu menjabat sebagai bendahara pada Bappeda Kabupaten Gianyar, benar ya Bu?
Informan (I2)	Iya benar. Saya bertugas sebagai bendahara yang menangani pencatatan transaksi keuangan serta membantu proses administrasi dan pelaporan keuangan di OPD.
Peneliti	Untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh, saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai dari tingkat OPD?
Informan (I2)	Kalau dilihat secara keseluruhan, proses penyusunan laporan keuangan sebenarnya tidak sebatas dimulai pada saat laporan akan disusun di akhir tahun. Proses tersebut sudah dimulai sejak tahap perencanaan anggaran.
Informan (I2)	Apa yang kami laporkan di akhir tahun sebenarnya sudah dibentuk sejak tahap perencanaan. Kode rekening dan struktur kegiatan itu sudah ditentukan dari awal penyusunan anggaran.
Informan (I2)	Pada tahap perencanaan tersebut, setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD telah ditentukan bersama dengan kode rekeningnya. Struktur inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pencatatan transaksi selama tahun anggaran berjalan.
Peneliti	Berarti sejak awal penyusunan anggaran sebenarnya sudah ada keterkaitan langsung dengan laporan keuangan yang akan dihasilkan pada akhir periode ya Bu?
Informan (I2)	Iya, karena setelah APBD ditetapkan seluruh struktur anggaran tersebut langsung dimasukkan ke dalam sistem informasi keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah.
Informan (I2)	Setelah APBD ditetapkan, semua sudah terkunci di sistem. Jadi setiap transaksi harus sesuai kode rekening yang ada. Itu yang membuat laporan di akhir tahun sudah mengikuti struktur dari awal.
Informan (I2)	Dengan sistem tersebut, setiap transaksi yang dilakukan oleh OPD harus mengikuti kode rekening yang telah ditentukan sehingga pencatatan menjadi lebih terstruktur.
Peneliti	Setelah tahap perencanaan selesai dan kegiatan mulai dilaksanakan, bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan di tingkat OPD?
Informan (I2)	Setelah tahap perencanaan ada tahap pelaksanaan anggaran, setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh dokumen sumber yang sah sebelum dicatat dalam sistem keuangan daerah.
Informan (I2)	Setiap penerimaan langsung kami input ke sistem berdasarkan dokumen sumber. Kalau sudah timbul hak, walaupun belum kas diterima, tetap dicatat sesuai ketentuan akrual.

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Peneliti	Dalam praktiknya di OPD, apakah bendahara yang secara langsung melakukan pencatatan transaksi tersebut ke dalam sistem?
Informan (I2)	Iya, bendahara bertugas mencatat setiap transaksi berdasarkan dokumen yang diterima seperti bukti penerimaan, kuitansi pembayaran, maupun dokumen pendukung lainnya.
Informan (I2)	Misalnya Belanja tidak bisa langsung dibayar begitu saja. Harus ada verifikasi dokumen, persetujuan pejabat, baru diproses di sistem. Semua sudah terstruktur
Peneliti	Setelah transaksi dicatat selama tahun berjalan, bagaimana proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan di tingkat OPD?
Informan (I2)	Di tingkat OPD, kami tidak sebatas melaksanakan anggaran namun pula bertanggung jawab menyusun laporan keuangan perangkat daerah sebelum laporan tersebut disampaikan kepada BPKAD.
Peneliti	Dalam proses penatausahaan tersebut, siapa saja pihak yang terlibat di tingkat OPD?
Informan (I2)	Biasanya ada beberapa pihak yang terlibat yaitu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta pejabat penatausahaan keuangan OPD yang melakukan verifikasi transaksi.
Peneliti	Apakah sebelum laporan tersebut disampaikan kepada BPKAD ada proses pengecekan atau verifikasi di tingkat OPD?
Informan (I2)	Iya, sebelum laporan dikirim biasanya kami melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah dicatat.
Informan (I2)	Sebelum laporan dikirim, kami cek lagi kesesuaian dengan DPA dan kode rekening. Kalau ada yang tidak sesuai, langsung diperbaiki di tingkat OPD.
Peneliti	Selain proses verifikasi tersebut, apakah OPD juga melakukan rekonsiliasi terhadap data keuangan yang telah dicatat?
Informan (I2)	Iya, rekonsiliasi biasanya dilakukan secara berkala selama tahun berjalan.
Informan (I2)	Kami lakukan rekonsiliasi secara berkala, bukan hanya di akhir tahun, supaya kalau ada selisih bisa segera diperbaiki.
Peneliti	Setelah seluruh transaksi dicatat dan direkonsiliasi, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat OPD?
Informan (I2)	Setelah seluruh transaksi dicatat dan direkonsiliasi, OPD kemudian menyusun laporan keuangan perangkat daerah seperti laporan realisasi anggaran, neraca perangkat daerah, laporan operasional, serta rincian aset dan kewajiban.
Peneliti	Setelah laporan keuangan perangkat daerah selesai disusun, bagaimana mekanisme penyampaian laporan tersebut kepada BPKAD?

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Informan (I2)	Setelah diverifikasi secara internal, laporan disampaikan kepada BPKAD melalui sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi untuk kemudian dikonsolidasikan menjadi LKPD.
Peneliti	Dalam praktiknya tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses tersebut berlangsung. Apakah ada hambatan tertentu yang sering terjadi di tingkat OPD?
Informan (I2)	Iya, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang berkaitan dengan sistem informasi, sumber daya manusia, serta manajemen waktu dalam penyusunan laporan.
Peneliti	Kalau dari sisi sistem informasi keuangan daerah sendiri, kendala seperti apa yang biasanya terjadi?
Informan (I2)	Biasanya kendala terjadi ketika mendekati akhir tahun anggaran karena banyak OPD mengakses sistem secara bersamaan sehingga sistem menjadi lebih lambat.
Informan (I2)	Selain itu kondisi jaringan internet juga kadang mempengaruhi kelancaran proses input data.
Peneliti	Apakah kondisi tersebut berdampak pada proses penyusunan laporan keuangan?
Informan (I2)	Iya, karena ketika sistem melambat maka proses pencatatan maupun rekonsiliasi data juga menjadi terhambat sehingga penyampaian data ke tahap berikutnya bisa tertunda.
Peneliti	Selain kendala sistem, apakah ada kendala lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia?
Informan (I2)	Iya, tidak semua pegawai yang menangani administrasi keuangan memiliki latar belakang akuntansi dan sering terjadi rotasi jabatan sehingga pegawai harus menyesuaikan diri dengan tugas baru.
Peneliti	Apakah kondisi tersebut mempengaruhi kualitas pencatatan transaksi?
Informan (I2)	Iya, dalam beberapa kasus bisa mempengaruhi seperti kesalahan klasifikasi akun belanja atau pencatatan kewajiban seperti pajak. Biasanya kesalahan tersebut diperbaiki saat verifikasi atau rekonsiliasi.
Peneliti	Apakah jumlah SDM juga menjadi kendala dalam proses penyusunan laporan?
Informan (I2)	Iya, kadang pekerjaan pencatatan dan penyusunan laporan hanya ditangani oleh satu atau dua orang sehingga ketika beban kerja meningkat pekerjaan menjadi cukup berat.
Peneliti	Apakah kondisi tersebut berdampak pada pengendalian internal di OPD?

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Informan (I2)	Iya, ketika pekerjaan menumpuk pada sedikit orang proses verifikasi menjadi tidak berlapis sehingga risiko kesalahan pencatatan bisa meningkat.
Peneliti	Bagaimana dengan pengaturan waktu dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan?
Informan (I2)	Idealnya rekonsiliasi dilakukan secara berkala selama tahun berjalan, tetapi dalam praktiknya kadang baru dilakukan secara intensif menjelang akhir tahun anggaran.
Peneliti	Apakah kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap tahapan berikutnya dalam proses penyusunan laporan keuangan?
Informan (I2)	Iya, karena jika rekonsiliasi terlalu dekat dengan batas waktu pelaporan maka waktu yang tersedia untuk proses pemeriksaan atau review juga menjadi lebih sempit.
Peneliti	Berdasarkan kendala tersebut, menurut Ibu apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan di OPD?
Informan (I2)	Salah satunya adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait akuntansi pemerintahan serta peningkatan koordinasi antar bagian agar rekonsiliasi dapat dilakukan lebih rutin.
Peneliti	Apakah menurut Ibu penggunaan sistem informasi juga perlu terus ditingkatkan?
Informan (I2)	Iya, sistem informasi sudah sangat membantu tetapi peningkatan kualitas jaringan dan pengelolaan akses sistem tetap diperlukan agar proses input data berjalan lebih lancar.
Peneliti	Baik Bu, dari penjelasan yang Ibu sampaikan dapat dipahami bahwa proses penyusunan laporan keuangan di OPD dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem informasi, kompetensi SDM, jumlah personel, serta pengelolaan waktu dalam rekonsiliasi. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang diberikan.
Informan	Iya sama-sama, semoga penelitiannya berjalan lancar.

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Informan 3

Transkrip Wawancara Bersama Inspektorat Kabupaten Gianyar

Lokasi : Inspektorat Kabupaten Gianyar

Informan/ jabatan : 1. Ni Wayan Sunarniti / Inspektur Pembantu Wilayah II sekaligus Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III (I3)
2. Made Budi Utami / Auditor (I4)

Peneliti : Pande Komang Ayu Sinta Lestari

Tabel Lampiran 6

Transkrip Wawancara Informan Inspektorat

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Peneliti	Selamat pagi Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait proses review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
I3	Selamat pagi. Silakan, kalau memang bisa membantu untuk penelitian tentu kami senang berbagi pengalaman terkait proses review yang kami lakukan di Inspektorat.
Peneliti	Sebelum masuk lebih jauh ke tahap teknis, saya ingin memahami terlebih dahulu posisi Inspektorat dalam keseluruhan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam struktur pengelolaan keuangan pemerintah daerah, bagaimana sebenarnya peran Inspektorat dalam kaitannya dengan LKPD?
I3	Peran kami di Inspektorat adalah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP. Dalam konteks laporan keuangan daerah, kami melakukan review terhadap LKPD sebelum laporan tersebut diperiksa oleh BPK.
I3	Namun perlu dipahami bahwa review ini berbeda dengan audit yang dilakukan oleh BPK.
I3	Review yang kami lakukan bukan audit, tetapi memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan sudah disusun sesuai SAP sebelum masuk pemeriksaan BPK.
I3	Jadi tujuan utama review adalah memberikan limited assurance, yaitu keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Peneliti	: Kalau boleh diperdalam, apa yang dimaksud dengan keyakinan terbatas dalam konteks review tersebut? Apakah berarti Inspektorat tidak melakukan pengujian sedetail audit BPK?
I3	: Betul. Dalam review kami tidak melakukan pengujian sedalam audit eksternal. Fokus kami lebih pada analisis kewajaran laporan dan konsistensi antar komponen laporan keuangan.
I3	: Namun demikian, kami tetap melakukan analisis yang cukup mendalam untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian yang signifikan sebelum laporan disampaikan ke BPK.
I3	: Tujuan utamanya sebenarnya adalah mendeteksi potensi masalah sejak awal, sehingga ketika laporan masuk ke tahap audit eksternal, sebagian besar koreksi sudah dilakukan.
Peneliti	: Bagaimana proses review tersebut dimulai secara operasional di Inspektorat?
I3	: Proses review sebenarnya sudah direncanakan setiap tahun melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Jadi kegiatan review LKPD sudah menjadi bagian dari agenda pengawasan rutin.
I3	: Tahap pertama biasanya dimulai dengan penerbitan surat tugas kepada tim review, kemudian kami menyampaikan surat resmi kepada BPKAD dan OPD untuk meminta data yang diperlukan.
Peneliti	: Dalam tahap ini apakah BPKAD menjadi pihak utama yang menyediakan data?
I3	: Iya. Karena BPKAD adalah pihak yang menyusun dan mengonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh OPD. Jadi sebagian besar data awal berasal dari BPKAD.
I3	: Namun dalam beberapa kasus kami juga meminta data langsung dari OPD jika diperlukan untuk penelusuran yang lebih detail.
Peneliti	: Bagaimana mekanisme pengumpulan dokumen tersebut dilakukan? Apakah masih manual atau sudah menggunakan sistem digital?
I4	: Sekarang sebagian besar sudah menggunakan sistem digital atau pengiriman melalui tautan resmi. Jadi dokumen dikirim dalam bentuk softcopy agar memudahkan analisis.
I4	: Dokumen yang kami minta biasanya cukup lengkap, mulai dari laporan keuangan utama, rincian akun, hingga dokumen pendukung transaksi agar analisis yang kami lakukan bisa ditelusuri sampai ke sumbernya.
Peneliti	: Apakah data yang diterima biasanya sudah dalam kondisi final?
I3	: Tidak selalu.

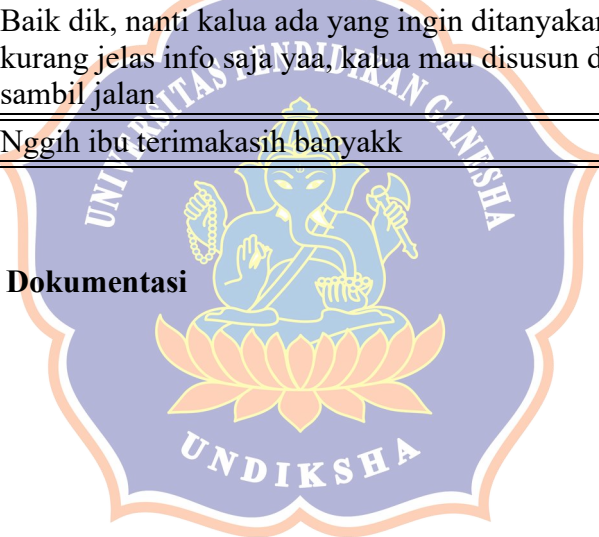
Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
I3	Kadang data dari OPD belum sepenuhnya final saat kami mulai review.
I3	Kalau data belum final, biasanya kami harus melakukan klarifikasi tambahan dengan BPKAD atau OPD terkait. Hal ini kadang membuat proses review menjadi lebih panjang.
Peneliti	Setelah data terkumpul, bagaimana langkah berikutnya agar analisis bisa dilakukan secara konsisten?
I3	Salah satu tahap penting adalah data freezing atau pembekuan data. Pada titik tertentu, misalnya per 31 Januari, data yang akan direview kami kunci terlebih dahulu.
I3	Data kami kunci pada tanggal tertentu supaya selama proses review tidak ada perubahan angka yang bisa mengganggu analisis.
Peneliti	Kenapa pembekuan data ini dianggap penting dalam proses review?
I3	Karena kalau data masih berubah-ubah selama proses review, analisis yang kami lakukan bisa menjadi tidak konsisten. Misalnya hari ini kami menemukan selisih, tetapi keesokan harinya angka tersebut sudah berubah.
I3	Dengan adanya data freezing, tim review bekerja dengan angka yang stabil sehingga analisis yang dilakukan bisa lebih akurat.
Peneliti	Setelah data dibekukan, bagaimana proses analisis laporan keuangan dilakukan oleh tim review?
I4	Tahap inti review adalah uji analitis. Dalam tahap ini kami tidak sebatas melihat angka namun pula mencoba memahami hubungan antar laporan keuangan.
I4	Misalnya kami melihat akun kas, persediaan, aset, utang, dan ekuitas serta keterkaitannya dengan laporan lain seperti LRA dan LO.
Peneliti	Apakah ada metode tertentu yang digunakan dalam analisis tersebut?
I4	Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah analisis perbandingan antara realisasi dengan anggaran serta angka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
I4	Kalau ada lonjakan angka yang tidak wajar atau berbeda signifikan dari tahun sebelumnya, itu langsung kami jadikan red flag untuk ditelusuri lebih lanjut.
Peneliti	Jika ditemukan red flag seperti itu, apa yang biasanya dilakukan oleh tim review?
I4	Kami akan melakukan penelusuran lebih detail sampai ke akun yang lebih spesifik bahkan sampai ke OPD yang bersangkutan.

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
I3	Beberapa temuan berkaitan dengan pajak baru terlihat saat kami lakukan penelusuran detail.
Peneliti	Dari pengalaman Ibu selama melakukan review, kesalahan atau temuan seperti apa yang paling sering muncul?
I4	Kesalahan yang sering kami temukan biasanya terkait pengakuan beban akrual dan pencatatan kewajiban yang masih harus dibayar.
I3	Sebagian kesalahan terjadi bukan karena disengaja, tetapi karena kurang memahami teknis akuntansi akrual.
Peneliti	Ketika ditemukan kesalahan tersebut, bagaimana mekanisme perbaikannya dilakukan?
I3	"Kalau ada ketidaksesuaian, kami buat surat usulan perbaikan untuk ditindaklanjuti."
I4	"Jika ada temuan, kami sampaikan dalam bentuk surat usulan perbaikan agar segera ditindaklanjuti sebelum laporan disampaikan ke BPK."
Peneliti	Dalam praktiknya, apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam proses review LKPD?
I3	Salah satu kendala yang cukup sering terjadi adalah keterlambatan data dari OPD karena rekonsiliasi internal belum selesai.
I3	"Ketika sistem bermasalah, otomatis data yang kami butuhkan untuk review juga ikut tertunda sehingga data yang kami dapat tidak lengkap."
Peneliti	Apakah faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas laporan yang direview?
I3	"Di beberapa OPD, pengelolaan keuangan masih sangat bergantung pada satu atau dua orang."
I4	"Rotasi pegawai sering berdampak pada kualitas awal penyusunan laporan."
Peneliti	Apakah kendala tersebut mempengaruhi waktu yang tersedia untuk melakukan review?
I4	"Kalau waktu review makin sempit, tentu analisis harus lebih intens."
Peneliti	Menurut Ibu, apa yang sebenarnya paling menentukan kualitas LKPD secara keseluruhan?
I3	Kalau verifikasi internal kuat, temuan saat review bisa jauh berkurang.
I3	Kalau rekonsiliasi dilakukan lebih rutin, koreksi di akhir bisa lebih sedikit.
I4	Temuan yang serupa kadang masih muncul setiap tahun.

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
Peneliti	Apakah tujuan review ini lebih kepada menemukan kesalahan laporan?
I3	Tujuan review bukan mencari kesalahan, tetapi mendorong perbaikan sistem agar ke depan lebih baik. Jadi review ini sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme pembelajaran dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peneliti	Baik Ibu, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi saya mencoba merangkum bahwa proses review yang dilakukan oleh Inspektorat sebenarnya merupakan tahap penting sebelum LKPD disampaikan kepada BPK. Dalam proses tersebut Inspektorat tidak sebatas memeriksa kesesuaian angka, namun pula melakukan analisis hubungan antar laporan serta menelusuri akun jika ditemukan ketidaksesuaian.
Peneliti	Selain itu, proses review juga sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan oleh OPD melalui BPKAD. Apabila rekonsiliasi di tingkat OPD belum selesai atau data yang disampaikan belum final, maka hal tersebut dapat mempengaruhi waktu dan kedalaman analisis yang dilakukan oleh tim review. Apakah pemahaman saya tersebut sudah sesuai dengan praktik yang terjadi di Inspektorat?
I3	Iya, kurang lebih seperti itu. Proses review memang sangat bergantung pada kualitas data awal. Kalau data yang kami terima sudah rapi dan rekonsiliasi di OPD berjalan baik, proses review biasanya bisa lebih cepat dan lebih fokus pada analisis substantif.
Peneliti	Berarti bisa dikatakan bahwa kualitas LKPD sebenarnya tidak sebatas ditentukan pada tahap akhir penyusunan laporan, tetapi sudah dipengaruhi sejak tahap pencatatan dan rekonsiliasi di OPD?
I3	Betul sekali. Kalau proses pencatatan sejak awal sudah tertib, biasanya temuan pada tahap review juga akan lebih sedikit.
I3	“Kalau verifikasi internal kuat, temuan saat review bisa jauh berkurang.” (I3)
I3	Selain itu rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin juga sangat membantu.
I3	“Kalau rekonsiliasi dilakukan lebih rutin, koreksi di akhir bisa lebih sedikit.” (I3;I4)
Peneliti	Baik Ibu, berarti dapat dipahami bahwa review oleh Inspektorat sebenarnya tidak sebatas berfungsi sebagai proses pemeriksaan, namun pula sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas laporan sebelum memasuki tahap audit eksternal oleh BPK.
I4	Iya benar. Review ini lebih bersifat penguatan internal. Harapannya ketika laporan masuk ke tahap pemeriksaan oleh

Peneliti / Informan	Pertanyaan / Jawaban
	BPK, sebagian besar koreksi sudah dilakukan sehingga proses audit bisa berjalan lebih lancar.
Peneliti	Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap dan mendalam mengenai proses review LKPD di Inspektorat Kabupaten Gianyar. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu saya dalam memahami bagaimana mekanisme pengawasan internal dilakukan sebelum laporan keuangan diperiksa oleh BPK.
I3	Sama-sama. Semoga penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengawasan internal di pemerintah daerah.
I4	Semoga juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan ke depan.
Peneliti	Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktu dan penjelasannya.
I4	Baik dik, nanti kalua ada yang ingin ditanyakan kembali atau kurang jelas info saja yaa, kalua mau disusun disini juga bisa sambil jalan
Peneliti	Nggih ibu terimakasih banyakk

Lampiran 6 : Dokumentasi





Gambar Lampiran 5 wawancara BPKAD



Gambar Lampiran 6 Penelitian BPKAD



Gambar Lampiran 7 Wawancara Inspektorat



Gambar Lampiran 8 Wawancara Inspektorat



Gambar Lampiran 9 Penelitian Inspektorat



Gambar Lampiran 10 Penelitian Inspektorat





Gambar Lampiran 11 Penelitian di OPD



Gambar Lampiran 12 Wawancara OPD



RIWAYAT HIDUP



Pande Komang Ayu Sinta Lestari lahir di Gianyar pada tanggal 13 Mei 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Wayan Wiastra dan Ibu Ni Nyoman Triani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Link. Sema Bitera, Kecamatan Gianyar, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 1 Bitera dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Gianyar dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari SMK Negeri 1 Gianyar jurusan Akuntansi dan melanjutkan ke Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2026 penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Gianyar)”. Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.